

# KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Nurdiana\*

\*Jurusan Pendidikan IPA Biologi Fakultas Tarbiyyah IAIN Mataram

Email:

**Abstract:** The aim of this paper is to give particular information of the reality of the national education. Like we know, national education as a part a historical reality of all human beings, does not escape these problems. Essentially, education means the acquisition of knowledge and abilities, and the development of one's character and mental power by systematic training and instruction. Education is therefore of great value to any person. It has been realised that a person without education is the deprived of many benefits. He not only lacks the knowledge of human affairs but also the ability to appreciate the value of many of the things that concern his own welfare. Thus, he is not able to contribute his full share to the progress of society particularly in Indonesia and the world. Neither is he able to develop his personality to the fullest extent.

**Kata kunci:** Globalisasi, neo-liberalisme, elitisme pendidikan

## PENDAHULUAN

Tampaknya tak ada wacana yang memperoleh begitu banyak perhatian populer dan akademik sebesar yang didapatkan oleh globalisasi. Dalam realitasnya sebagian besar perhatian akademik dimotivasi oleh begitu besarnya ketertarikan dan kecemasan publik terhadap globalisasi. Globalisasi yang berdideologikan neoliberalisme telah menyelesak masuk dan melanda berbagai sektor kehidupan (Azizy, 2003). Globalisasi dapat dianalisa secara ekonomi, politik, kultural maupun institusional. Pada tingkat ekonomi, terjadilah pemaksaan pembukaan pasar-pasar disemua negara diseluruh dunia. Pada tingkat politik, terjadilah kematian demokrasi karena politisi lebih suka menjamu para kapitalis mancanegara daripada konstituen mereka dalam negeri. Pada tingkat ekologi, terjadilah perusakan lingkungan oleh perusahaan multinasional. Pada tingkat kebudayaan terjadilah Mcdonalisasi (McDonalization), sebuah istilah tentang serbuan kebudayaan global (Amerika?) yang menekan kebudayaan lokal sampai ke sudut yang paling sempit dan periferal (Ritzer dan Goodman, 2004).

Sejak krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia awal 1997 berakibat kepada semakin besarnya ketergantungan negara kepada pihak swasta nasional maupun multi nasional. Hal ini dapat dilihat dari besarnya beban hutang yang harus ditanggung oleh negara dan ketergantungannya terhadap kebijakan neoliberalisme tersebut.

Sejak krisis tersebut (bahkan sebelumnya) Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang terkena dampak parah globalisasi dengan ideologi neoliberalismenya termasuk dalam sektor pendidikannya. Dampak globalisasi terhadap pendidikan yang langsung kita rasakan akibatnya adalah dijadikannya pendidikan sebagai industri atau komoditas yang dapat menghasilkan nilai ekonomi oleh berbagai pihak terutama negara sebagai pengambil kebijakan (*the decision maker*). Dalam ideologi neoliberal, pendidikan dilihat sebagai komoditi dan tunduk kepada hukum pasar (*supply and demand*). Oleh sebab itu pendidikan yang baik bukan *academic excellence*, tetapi yang membutuhkan biaya besar dan mahal (Tilaar, 2004).

Implikasinya maka pendidikan menjadi elitis, hanya bisa dibeli oleh kelas yang memiliki modal. Semakin kaya seseorang maka semakin kuat pula seseorang membeli pendidikan

(sekolah) yang lebih berkualitas dari TK/RA sampai Perguruan Tinggi. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah kemampuan ekonomi seseorang semakin rendah pula kualitas dan jenjang pendidikan yang dibelinya..

Bahkan tidak sedikit orang miskin yang tidak mampu membayar pendidikan walaupun hanya pendidikan tingkat dasar (SD/MI). Alih-alih membayar pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan subsistensi (pangan) sehari-harinya saja sering tak terpenuhi. Hidupnya praktis diabdikan hanya sekedar mencari sesuap nasi untuk bisa bertahan hidup. Padahal, pendidikan dasar, bahkan menengah yang masih susah diakses oleh rakyat miskin belum tentu dapat dijadikan modal untuk hidup layak. Lulusan pendidikan dasar tidak bisa mengakses pekerjaan diberbagai instansi baik pemerintah maupun swasta, kecuali mungkin untuk pekerjaan sekelas tukang sapu dan tenaga kuli, yang gajinya juga hanya bisa untuk menyekolahkan anaknya ditingkat dasar. Selanjutnya anak tukang sapu dan tenaga kuli yang hanya mampu mengenyam pendidikan di tingkat dasar tersebut, pada akhirnya juga hanya bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan kelas orang tuanya.

Berbeda dengan kelas orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya dari SD sampai Perguruan Tinggi berkualitas dengan berbagai fasilitas-fasilitas mahal. Ijazah Perguruan Tinggi apalagi yang berkualitas tentu saja menjadi surat sakti bagi seseorang untuk menempati berbagai pos pekerjaan bergengsi dengan gaji yang tinggi di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Gaji yang dimilikinya ini, akan memudahkannya untuk menyekolahkan anaknya sampai Perguruan Tinggi berkualitas pula yang pada akhirnya akan memudahkan anaknya memperoleh pekerjaan bergengsi dengan gaji tinggi sekelas orang tuanya. Proses inilah yang oleh Pierre Bourdieu disebut sebagai reproduksi sosial, yaitu pendidikan hanya menjadi alat untuk mereproduksi kelas sosial (Swartz, 1997).

Gambaran pendidikan tersebut yang saat ini terjadi di Indonesia sangat tidak berpihak pada rakyat miskin, yang merupakan kelas mayoritas, secara kuantitas, di Indonesia, seolah-olah kebijakan ini mau mengatakan "*orang miskin dilarang sekolah*". Sebaliknya pendidikan berpihak pada kelas kaya yang memiliki banyak modal (uang) untuk membeli pendidikan berkualitas. Minimnya, bahkan tertutupnya akses pendidikan berkualitas bagi rakyat miskin ini, tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia karena penentu arah kebijakan pendidikan adalah pemerintah. Maka dalam hal ini yang patut disalahkan adalah pemerintah karena telah menjadikan pendidikan sebagai komoditas industri (industrialisasi pendidikan) yang hanya bisa diakses kelas atas (Brugmans, 1987).

Industrialisasi pendidikan tersebut jelas mengingkari amanah yang diberikan rakyat kepada para elit pemerintah. Karena alasan ekonomi, tidak semua rakyat Indonesia bisa mengakses pendidikan yang bermutu. Padahal hak mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh UUD 45, sebagai UU tertinggi negara Indonesia, tepatnya dalam pembukaan UUD 45, "...mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara..." dan pasal 31 Amandemen UU 1945 Ayat (1) "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Industrialisasi pendidikan tersebut juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena pendidikan sangat penting bagi eksistensi umat manusia (Wahono, 2001). Perbedaan manusia dengan binatang ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki. Jika manusia sampai tidak memiliki pengetahuan karena tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan berarti derajatnya tidak berbeda dengan binatang. Dalam pepatah Arab dikenal

dengan istilah *insanun hayawanun nathiq* yang artinya manusia adalah binatang yang berakal (berpengetahuan).

Berdasarkan uraian di atas, timbul satu pertanyaan pokok yang akan dijawab dalam makalah ini yaitu mengapa kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah tidak berpihak pada rakyat miskin yang merupakan kelas mayoritas di Indonesia, apalagi kebijakan tersebut juga telah mengkhianati HAM dan cita-cita negara yang tercantum dalam UUD 1945 sebagai perundang-undangan tertinggi negara Indonesia? Namun sebelum menjawab pertanyaan di atas, marilah terlebih dahulu kita melihat berbagai arah kebijakan pemerintah dalam sektor pendidikan yang tidak berpihak pada rakyat.

### **Elitisme Kebijakan Dalam Dunia Pendidikan**

Bukan tanpa sebab bila kondisi dunia pendidikan kita amatlah memprihatinkan. Ada banyak hal yang membuat pendidikan melenceng semakin jauh dari cita-cita idealnya sebagai wahana pembebasan dan pemberdayaan. Pertama, kecenderungan pendidikan semakin elitis dan tak terjangkau rakyat miskin. Dalam hal ini pemerintah dituding banyak melahirkan kebijakan diskriminatif yang justru menyulitkan akses rakyat miskin ke pendidikan. Kedua, manajemen pendidikan yang masih birokratis dan hegemonik. Sistem pendidikan yang ada saat ini bukanlah memberdayakan dan populis. Terbukti berbagai kebijakan yang lahir tidak mendukung terwujudnya pendidikan yang emansipatoris karena kebijakan tersebut lahir semata-mata untuk mendukung status quo dan memapankan kesenjangan lewat industrialisasi pendidikan (Darmaningtyas, 2005).

Industrialisasi pendidikan ini dapat kita lihat secara jelas dari berbagai kebijakan oleh pemerintah yang mengarah pada privatisasi pendidikan. Pertama, kebijakan pemerintah yang menerapkan konsep MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Di negara-negara lain seperti Selandia Baru, Australia dan Amerika Serikat yang lebih dulu menjalankan MBS, memaknai MBS sebagai proses demokratisasi pengambilan keputusan di sekolah. Bila semula keputusan dilakukan secara tunggal oleh negara, dengan adanya MBS itu proses pengambilan keputusan dilakukan bersama pihak-pihak yang terlibat (multi stakeholder), termasuk orang tua murid dan murid sendiri. MBS sama sekali tidak berkaitan dengan masalah biaya karena pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab negara.

Namun, di Indonesia MBS dimaknai lain, terutama melakukan mobilisasi dana, bukan sebagai proses demokratisasi pengambilan keputusan pendidikan. MBS hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan warganya. Dengan kata lain, menurut Darmaningtyas, MBS merupakan kependekan dari "Masyarakat Bayar Sendiri". karena MBS, masyarakat membayar sendiri pendidikannya.

Kedua, kondisinya akan lebih buruk lagi bila RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) disahkan menjadi UU BHP. Berubahnya status lembaga pendidikan dari milik publik ke bentuk badan hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya belum jelas.

Ketiga, kehadiran UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang semula diharapkan dapat melindungi warga, ternyata malah mengaburkan hak-hak warga negara untuk memperoleh akses pendidikan dari negara. Pasal 34 Ayat (2) UU No 20 tahun 2003 menyatakan

“Pelaksanaan Wajib belajar sembilan tahun tanpa memungut biaya”. Namun, bunyi ayat ini dianulir oleh Pasal 46 Ayat (1) yang menyatakan, “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.”

Adanya dua pasal kontradiktif itu memperlemah posisi warga. Warga yang menuntut pelayanan pendidikan secara gratis dapat dituntut balik dengan kata-kata “bukankah pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat?” Pasal 46 UU No 20 Tahun 2003 inilah yang lalu menjadi cantolan pelaksanaan MBS.

Keempat, kebijakan otonomisasi kampus yang menghasilkan status 4 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) besar yang terdiri dari UGM, UI, ITB dan IPB menjadi BHMN (Prasetyo, 2005). Otonomisasi kampus dimaknai pemerintah sebagai penyerahan pendanaan biaya operasional kampus dari pemerintah kepada keempat universitas tersebut. Artinya, beban operasional kampus yang selama ini ditanggung oleh pemerintah sekarang diserahkan seluruh pembiayaannya pada kampus. Dan pada akhirnya mahasiswa yang menanggung beban tersebut dengan naiknya biaya pendidikan yang berlipat ganda (Nugroho, 2002).

Sebelum adanya otonomi kampus, keempat kampus tersebut yang merupakan terbesar di Indonesia dengan kualitas yang sangat baik mudah diakses oleh masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan biaya operasional ditanggung oleh pemerintah, sehingga biaya pendidikan terjangkau oleh mahasiswa. Setelah dilaksanakan otonomi kampus, keempat universitas tersebut tidak mungkin lagi diakses oleh mereka yang berpenghasilan pas-pasan karena melambungnya biaya pendidikan, bahkan melebihi universitas swasta. Penerimaan mahasiswa tidak lagi berdasarkan prestasi akademik dan kecerdasan otak, namun ditentukan seberapa besar sumbangan yang diberikan pada universitas. Padahal modal Pendidikan Tinggi inilah sebenarnya yang menjadi syarat seseorang untuk bisa hidup secara layak sebagaimana kami jelaskan dalam pendahuluan.

Kelima, sebagaimana dilansir Ki Supriyoko, pemerintah telah meratifikasi WTO melalui UU No. 7 Tahun 1994, yang melalui GATS (*General Agreement on Trade Indonesia Service*) memposisikan pendidikan sebagai jasa yang dapat saling diperdagangkan –dan di dalamnya termasuk sekolah dasar, menengah dan Perguruan Tinggi- maka perdagangan jasa pendidikan akan semakin sulit untuk dielakkan. Secara lebih rinci, di dalam GATS disebutkan belasan jasa yang dapat diperdagangkan secara internasional dan salah satunya adalah pendidikan.

### **Kekuatan Globalisasi dan Implikasinya Terhadap Pendidikan**

Salah satu gelombang yang melanda kehidupan umat manusia dewasa ini adalah globalisasi. Berbicara tentang arah kebijakan pemerintah termasuk pendidikan yang cenderung ke kanan, artinya lebih berpihak pada pasar (baca: kelas atas) daripada pada rakyat, tidak bisa lepas dari kuatnya arus globalisasi yang berideologikan neoliberalisme. Ideologi ini berkiblat pada pemujaan pasar bebas yang begitu percayanya bahwa tidak hanya produksi, distribusi dan konsumsi yang tunduk pada hukum pasar, tetapi seluruh kehidupan, termasuk pendidikan (Wibowo, 2003).

Menurut William Greider, sebagaimana dikutip oleh I. Wibowo bahwa motor di balik globalisasi adalah yang disebutnya kapitalisme global. Sesuai watak dari kapitalisme yang rakus dan tak pernah puas, mereka beramai-ramai menguras kekayaan dunia, masuk ke dalam kantung

mereka, dengan memanfaatkan teknologi komputer, mengabaikan semua tatanan kesantunan hidup bersama. Memang para kapitalis global itu telah memungkinkan penyebaran kenyamanan dan kemudahan, tetapi itu semua hanya untuk 10 persen dari penduduk dunia, sementara jurang antara si kaya dan si miskin menjadi kian menganga (Salmi, 2005).

Keberpihakan (baca: keterbijakan) Indonesia pada kapitalisme global ini bisa dilacak kebelakang, mulai dari pemerintahan Orde Baru (ORBA). Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama (ORLA) yang berusaha untuk netral dan tidak memihak salah satu blok, baik blok kapitalis maupun komunis, walaupun pada praktek lebih condong ke kiri-kirian (komunis). Hal ini bisa kita pahami dari sudut pandang politis dan ekonomis. Secara politis, keberhasilan Soeharto menduduki kursi kepresidenan karena dukungan Amerika sebagai representasi negara kapitalis. Sudah sejak lama Amerika (representasi kapitalisme) berebut pengaruh dengan Uni Soviet (representasi komunisme) dalam mendapatkan simpati dari negara-negara dunia ke-3 untuk menjadi anggotanya.

Indonesia dengan wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar, tentu menjadi lahan strategis bagi Amerika untuk memasarkan produksinya, sekaligus mengeruk kekayaan alamnya untuk dibawa ke negerinya. Salah satu faktor keberpihakan Soeharto pada kapitalisme ini adalah kompensasi dari dukungan politis Amerika yang diberikan kepadanya. Jadi hubungan antara Soeharto dan Amerika adalah simbiosis mutualisme. Soeharto membutuhkan Amerika untuk mendapatkan kursi kekuasaan di Indonesia dengan harapan Soeharto berkiblat pada kapitalisme dengan membuka pasar Indonesia sebagai pasar bebas.

Sedangkan secara ekonomis, untuk membangun Indonesia yang mengalami depresi ekonomi pada awal pemerintahan, diperlukan biaya tidak sedikit. Pembangunan, khususnya pembangunan fisik dengan barometer pertumbuhan ekonomi menjadi cita-cita “mulia” Orba yang harus dicapai. Untuk merelisir terwujudnya pembangunan ekonomi tersebut, pemerintah mengundang para agen kapitalis global (MNC) untuk menanam modalnya ke Indonesia. Masuknya investasi asing ke Indonesia ini, dengan berdirinya berbagai perusahaan dan pabrik diharapkan akan menyerap ribuan tenaga kerja yang selama ini tidak memiliki pemasukan ekonomi. Dengan begitu akan memakmurkan kehidupan rakyat Indonesia. Tentu saja masuknya invstasi ke Indonesia ini dengan berbagai kompensasi yang diberikan pemerintah kepada para investor (kapitalis), seperti rendahnya pajak, kontrak kerja yang merugikan pemerintah Indonesia.

Selain mengundang MNC, pemerintah juga mengajukan berbagai bantuan kepada agen kapitalis global lain, yaitu lembaga keuangan internasional (IMF, WTO dan Bank Dunia) dlm jumlah yang sangat besar. Pencairan utang tersebut dibarengi berbagai syarat yang harus diikuti pemerintah yang mengarah pada pembukaan pasar Indonesia bagi produk-produk negara kapitalis. Pada tahun 1983 dan 1988, pemerintah membebaskan sistem perbankan, sebagai salah satu kompensasi dicairkannya utang oleh lembaga keuangan dunia tersebut (Wibowo, 2003). Kontan mulai tahun ini menjamur berbagai bank swasta di Indonesia, bahkan angkanya mencapai lebih dari seratus. Dampak dari kebijakan ini adalah tidak terkontrolnya utang swasta terhadap luar negeri lewat bank-banki swasta ini. Sebelumnya utang swasta terkontrol oleh negara, karena semua utang melauai bank pemerintah.

Jatuh tempo pembayaran utang swasta tersebut bertepatan dengan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997. ketidakmampuan swasta membayar utang memperparah krisis ekonomi, bahkan nilai rupiah terju bebas dari Rp. 2.500 per US \$ sampai Rp. 15.000 lebih per US \$. Hal ini mengakibatkan utang Indonesia semakin berlipat dan sekarang utang Indonesia mencapai lebih dari 1000 trilyun rupiah. Menurut I. Wibowo, seandainya pada tahun 1983 dan 1988 Indonesia tidak membebaskan sistem perbankan dan juga pada tahun 1997 Indonesia tidak menganut “rejim devisa bebas” dalam hal perdagangan valuta asing (seperti yang dipraktekkan oleh RRC Cina), besar kemungkinan bahwa Indonesia tidak terkena krisis finansial yang dahsyat itu. Tetapi Indonesia telah 23 tahun mengarahkan ekonominya ke rejim perdagangan bebas, dan ini dipandang sebagai suatu hal yang “wajar” dalam rangka pikir neoliberal.

Krisis yang demikian parah tersebut mengakibatkan ketergantungan yang semakin tinggi terhadap kebijakan neoliberal. Terdapat 10 kebijakan neoliberal yang secara eksplisit merugikan negara-negara miskin termasuk Indonesia. Kesepuluh ajaran dan kebijakan tersebut adalah; (1) disiplin fiskal, yang intinya memerangi devisa perdagangan; (2) public expendatur atau anggaran pengeluaran untuk publik yakni prioritas anggaran belanja pemerintah melalui pemotongan segala subsidi; (3) pembaruan pajak, seringkali kelonggaran bagi pengusaha untuk kemudahan membayar pajak; (4) liberalisasi keuangan, berupa kebijakan bunga bank yang ditentukan oleh mekanisme pasar; (5) nilai tukar uang yang kompetitif, berupa kebijakan untuk melepas nilai tukar uang tanpa kontrol dari pemerintah; (6) trade liberalization barrier, yaitu kebijakan untuk menyingkirkan segenap hal yang mengganggu perdagangan bebas, seperti kebijakan untuk mengganti segala bentuk lisensi perdagangan dengan tarif dan pengurangan bea tarif; (7) foreign direct investment, berupa kebijakan untuk menyingkirkan segenap aturan pemerintah yang menghambat pemasukan modal asing; (8) privatisasi, yaitu kebijakan untuk memberikan semua pengelolaan perusahaan negara kepada pihak swasta; (9) deregulasi kompetisi, yakni mengurangi peraturan pemerintah dalam segala hal yang bisa menurunkan keuntungan, termasuk dalam hal perlindungan alam dan keselamatan kerja; (10) *intellectual Proverty Right* atau paten (Fakih, 2002).

Akibat dari kebijakan yang ditekan dan dipaksakan neoliberalis terhadap negara-negara dunia ketiga membawa konsekuensi pada sistem pendidikan nasional yang tidak berpihak kepada rakyat. Lembaga pendidikan menjadi komoditas menjanjikan untuk akumulasi modal dan profit maksimal. Pendidikan menjadi komoditas perdagangan sebagaimana komoditas lainnya. Konsekuensinya pendidikan harus mengikuti aturan main pasar, yaitu privatisasi dan liberalisasi pendidikan. Privatisasi pendidikan berarti, pemerintah menyerahkan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan pendidikan pada swasta yang berarti pula pengurangan subsidi bagi pendidikan. Sedangkan liberalisasi pendidikan berarti, membuka pasar pendidikan bagi dunia internasional. Melalui UU Sisdiknas, pemerintah secara legal mengizinkan masuknya lembaga pendidikan asing di negeri ini.

Alasan yang mendasar pemerintah melakukan privatisasi pendidikan adalah pertama, privatisasi didorong oleh motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kedua, privatisasi adalah anak kandung liberalisme yang semakin mengglobal dan menyentuh berbagai bidang kehidupan. Ketiga, pemerintah merasa tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai sektor pendidikan.

Namun kenyataannya, liberalisasi dan privatisasi pendidikan mengakibatkan dampak yang negatif bagi rakyat Indonesia, khususnya kelas menengah dan bawah, sebagai mayoritas dari segi kuantitas. Di antara dampak yang buruk tersebut adalah mahalnya dunia pendidikan, semakin memperbesar *gap* dalam kualitas pendidikan dan diskriminasi sosial, bergesernya budaya akademik menjadi budaya ekonomis konsumeris dan pop, dan yang paling parah adalah tereduksinya fungsi pendidikan sebagai pemutus mata rantai kemiskinan. Pendidikan sebagai alat pemberdayaan yang dapat memutus rantai kemiskinan semakin hilang fungsinya. Dalam hal ini, privatisasi dan liberalisasi pendidikan menjadi alat untuk melanggengkan kemiskinan

Hal ini tidak akan terjadi, bila pemerintah tidak terjebak dalam arus globalisasi yang berideologikan neoliberalisme yang dinahkodai oleh para agen kapitalis global. Sekedar perbandingan, mungkin kita bisa belajar dari pemerintah Jerman dalam menangani dunia pendidikannya.

### **Belajar Dari Negeri Seberang**

Mungkin tidak relevan dan fair membandingkan negeri ini dengan negara lain. Apalagi negara tersebut termasuk paling tinggi pendapatan perkapitanya di dunia. Tetapi seorang bijak tidak akan malu belajar dari pengalaman mereka yang sukses membangun negerinya. Berdasarkan pendapat Thoralf Hanstein, Profesor tamu dari Leipzig University ketika berkunjung ke IAIN Mataram dan teman-teman IAIN Mataram yang pernah berkunjung ke Jerman beberapa waktu lalu, kami hanya tersenyum kagum. Siswa di sana tidak dipungut biaya untuk mendapatkan pendidikan (gratis), mulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Pemerintah memberi subsidi seratus persen kepada semua institusi pendidikan. Mengapa pemerintah Jerman begitu berani memberi subsidi 100 persen di bidang pendidikan? Dari mana dananya? Sejarah panjang bangsa Jerman di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menyadarkan pemerintahnya untuk mencurahkan biaya besar untuk dunia pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas secara langsung dan tidak langsung akan memacu berbagai kemajuan pembangunan di berbagai bidang. Untuk mendapatkan sumber dananya diterpakan subsidi silang dengan memberlakukan pajak progresif, yang dengan begitu swasta niaga raksasa dan orang-orang kaya mensubsidi mereka yang tidak mampu, sehingga mereka bisa menikmati jaminan sosial dan pendidikan tinggi.

Meski di era globalisasi negara-negara kesejahteraan juga dipaksa oleh kekuatan neoliberal untuk memprivatisasi beberapa sektornya, karena pemerintah yang kuat, hukum yang kokoh, dan masyarakat sipilnya berdaya, subsidi silangpun terus berlangsung untuk menjamin pemerataan kesejahteraan.

Tak heran bila pengajar sekolah menengah dan dosen universitas di sana semuanya bergelar doktor. Siswapun bisa tenang dan berkonsentrasi dengan tenang dalam belajar, tanpa dibebani pikiran membayar sekolah dan kuliah. Para orang tua tidak perlu meminjam sana-sini dan menjual tanah untuk membiayai pendidikan anaknya. Bahkan pemerintah memberikan pinjaman sosial bagi para pengangguran, termasuk para pelajar, yang akan dikembalikan si peminjam bila sudah bekerja.

Pajak progresif ini tentu saja banyak ditentang oleh pengusaha swasta raksasa dan orang-orang kaya, karena merekalah yang paling terkena dampaknya. Ketakutan akan jutaan Mark akan jatuh dan lari ke negara lain tidak menggoyahkan keyakinan pemerintah Jerman untuk

menegakkan keadilan. Mereka adalah bangsa yang mempunyai rasa nasionalisme yang kuat. Kewajiban mereka membayar pajak dikompensasi dengan pendidikan dan manusia yang bermutu.

Cerita lain sebagai perbandingan realitas pendidikan adalah Kuba. Negeri itu dipimpin oleh seorang Presiden Nyentrik, tetapi punya kebijakan yang menakjubkan, menggratiskan sekolah. Prsidennya bernama Fidel Castro yang konon punya ambisi ingin membekuk kapitalisme. Lambang perlawanannya bukan diwujudkan dalam bendera atau slogan tapi kebijakan yang membanggakan: gratiskan sekolah. Terlepas apakah ideologi negara Kuba ini berbasis sosialis atau marxis, toh sumbangan terpenting, membuat penduduk bisa menikmati pendidikan hingga jenjang universitas tanpa ongkos (Prasetyo, 2005) Artinya sekolah gratis itu bukan mimpi siang bolong, tapi kenyataan yang ada hingga saat ini. Karenanya, sungguh naif jika seorang yang masih jadi pembela habis-habisan, sekolah dengan biaya mahal; kentara sekali kalau ia kurang informasi!! Tetapi siapa pemimpin kita yang mau ngomong soal sekolah? Presiden, dari keturunan siapapun atau menyandang gelar apa saja, kiranya sedikit yang peduli pada sekolah (Darmaningtyas, 2005).

Cerita ini membuat nyinyir karena keadaan di negeri ini malah sebaliknya. Biaya pendidikan tinggi semakin tinggi setiap tahunnya di universitas swasta dan negeri. Subsidi universitas negeri dikurangi dan kemudian akan menjadikannya institusi swadana (swasta). Pajak penghasilan (PPh) akan dikenakan pada perguruan tinggi swasta, yang berarti membenarkan anggapan perguruan tinggi swasta sebagai lembaga komersial. Bukankah pada akhirnya biaya itu semua akan dibebankan pada masyarakat atas nama mahasiswa juga? Mengapa pihak swasta-swasta niaga raksasa dan orang-orang kaya tidak diikutkan dalam mensubsidi lembaga pendidikan tinggi yang ada daripada mendirikan sekolah-sekolah yang elitis. Padahal merekalah yang paling banyak menyerap dan menikmati tenaga-tenaga manusia berkualitas. Kalaupun ada swasta niaga raksasa yang mensubsidi lembaga pendidikan, hal itu dilakukan hanya pada lembaga pendidikan milik mereka. Semoga kesuksesan negara Jerman dan Kuba dalam menangani pendidikannya dapat menjadi teladan bagi pemerintah kita.

## **PENUTUP**

Arus globalisasi yang berideologikan neoliberalisme telah menghantam seluruh negara. Ideologi ini sengaja disebar sebagai usaha rekayasa sosial yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis liberalis untuk tetap mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari negara-negara bekas jajahannya pasca penjajahan fisik. Dengan kata lain globalisasi merupakan bentuk penjajahan baru oleh negara-negara kapitalis imperialis terhadap negara berkembang tak terkecuali Indonesia.

Dampak globalisasi terasa di segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, akibat dari diterimanya paham neoliberalisme adalah keputusan pemerintah untuk memprivatisasi lembaga-lembaga pendidikan, membiarkan modal-modal asing maupun swasta masuk ke lembaga pendidikan (liberalisasi pendidikan) sehingga pendidikan menjadi ajang untuk memperkaya diri. Di saat krisis seperti ini, peran negara dan pemerintah sebagai pengatur dan pelindung masyarakat harus dijalankan. Negara memiliki peran yang sangat signifikan dalam rangka menyeimbangkan dan pemeratakan kesejahteraan dan keadilan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Jangan biarkan mekanisme pasar mengatur dirinya sendiri yang justru akan memporak-porandakan tatanan sosial, ekonomi dan politik suatu negara sebagaimana paham neoliberalisme bekerja.

## DAFTAR RUJUKAN

- Azizy, A. Q, 2003. *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.
- Brugmans, J, 1987. *Politik Pengajaran” dalam politik etis dan Revolusi Indonesia* Jakarta: Obor, 1987.
- Darmaningtyas, 2004. “MBS=Masyarakat Bayar Sendiri” dalam Kompas, 5 Agustus
- Darmaningtyas, 2005. *Pendidikan Rusak-Rusakan*. Yogyakarta: LKiS
- Fakih, Mansour, 2001. “Komodifikasi Pendidikan Sebagai Ancaman Kemanusiaan”, pengantar buku Fancis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan Antara Kompetisi dan Keadilan* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour, 2002. *Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour, 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- I. Wibowo, “Kata Pengantar” dalam I. Wibowo (ed.), *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan* (Yogyakarta: Cindelas, 2003), hlm.xii
- Nugroho, Heru, 2002. *Mc Donaldisasi Penddikan Tinggi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prasetyo, Eko, 2005. *Orang Miskin Dilarang Sekolah*. Yogyakarta: Resist Book.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., 2004. *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan. Jakarta: Prenada Media.
- Salmi, Jamil, 2005. *Violence and Democratic Society*, diterjemahkan oleh Slamet Raharjo. Yogyakarta: Pilar.
- Saoekirno, Soelastri, 2005. “Bisnis Sekolah: Sekolah Internasional Vs Konvensional”, dalam *Kompas*, 3 Mei 2005
- Supriyoko, Ki, 2003. “Siap-siap menyambut Kehadiran PT Asing” dalam *Kompas*, 11 September 2003.
- Swartz, David, 1997. *Culture and Power, The Sosiology of Pierre Bourdieu* Chicago: The University of Chicago.
- Tilaar, H.A.R, 2004. *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* . Jakarta: Grasindo.
- UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
- Wibowo, I dan Wahono, Francis, 2003. *Neoliberalisme* Yogyakarta: Cindelas.
- Wibowo, I, 2002. “Globalisasi dan Kapitalisme Global” dalam *Kompas*, 27 April 2002.